

Policy Brief

Inovasi Daerah dalam Astacita – Menuju Indonesia Emas Tahun 2045 :

Tinjauan tentang *State Capacity* dan Integrasi antara Penganggaran dan Perencanaan Pembangunan dan Investasi Daerah Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Purwakarta

Endra Prasetyo, ST. MT.

Analisis Kebijakan Ahli Muda

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Purwakarta

RINGKASAN KEBIJAKAN

State capacity memiliki tuntutan agar organisasi atau institusi pemerintahan yang mencoba meningkatkan kinerjanya, perlu untuk menjalankan proses inovasi organisasi, yaitu perilaku organisasi baru yang memiliki probabilitas besar dalam munculnya tuntutan akan bentuk organisasi yang baru. Dari sudut pandang struktur perekonomian daerah, dapat dikatakan bahwa *state capacity* seharusnya juga mencakup kontrol dan inovasi dalam pembangunan perekonomian daerah. Artinya, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, inovasi integrasi sistem dan lembaga perencanaan dan penganggaran juga mencakup *state capacity* dalam menganalisis struktur perekonomian sebagai bagian dari tugas perencanaan pembangunan. *State capacity* merupakan dasar pemikiran utama bagi unsur-unsur pemerintahan dalam meraih Visi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045, sebagai pijakan dan dasar inovasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dalam lingkup *national state capacity* (kemampuan nasional dalam menjalankan pemerintahan), inovasi berupa integrasi sistem dan institusi perencanaan dan penganggaran secara studi masih dipandang cukup dalam proses meraih Visi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045, namun dalam lingkup *under regional state capacity* (kemampuan daerah secara sektoral dalam menjalankan pemerintahan), inovasi berupa integrasi sistem dan institusi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dan perijinan dan penanaman modal terpadu di Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil analisis merupakan kombinasi integrasi yang krusial untuk pencapaian Visi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045, terutama dalam penekanan perekonomian sebagai bagian dari sistem keamanan wilayah dan struktur perekonomian berbasis industri yang bertumpu pada nilai investasi PMA dan PMDN. Integrasi ini diharapkan akan dapat menghasilkan produk-produk dan target-target perencanaan serta penganggaran pembangunan Kabupaten Purwakarta yang terpadu berbasis struktur perekonomian terkini dari hasil analisis terhadap setiap flow data pertumbuhan dan perkembangan investasi daerah.

SARAN KEBIJAKAN

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi berbasis 57%-58% pada sektor industri yang bergantung kepada nilai investasi per tahun, Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu untuk mengadopsi gagasan integrasi sistem dan institusi antara fungsi-fungsi perencanaan pembangunan, penganggaran dan perijinan serta penanaman modal terpadu, sebagai upaya meraih *state capacity* (kapasitas menjalankan fungsi pemerintahan) di bidang ekonomi yang lebih baik, lebih fokus, lebih ringkas dan efisien. Sebagai gagasan penyatuan 2-3 institusi (dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), penyatuan atau integrasi yang bersifat ekstrim dan total ini perlu untuk dikaji terlebih dahulu, terutama dari sisi Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK), aturan-aturan kerja, waktu yang tersedia sebelum mulai beroperasi, dan sebagainya, namun dari sisi kepentingan strategis peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta, gagasan integrasi ini layak dipertimbangkan dan dikaji serta semaksimal mungkin diterapkan. Hal ini disebabkan karena integrasi ini telah lama diterapkan di negara-negara maju dan berdasarkan analisis merupakan hal yang krusial dalam pencapaian Visi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045.

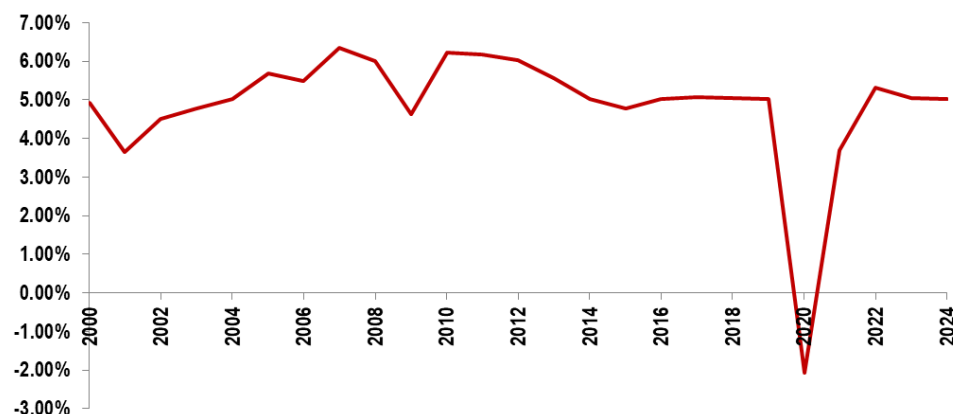
PENDAHULUAN : Visi Astacita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045

Pada tanggal 20 Oktober 2024, Bapak Prabowo Subianto telah resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Dengan 8 Visi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045, beliau menjanjikan masa depan negara Republik Indonesia yang lebih baik daripada masa-masa Presidensial sebelumnya. Ke-8 Visi Astacita tersebut diantaranya adalah :

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
- 3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- 8) Memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk dapat mencapai masa depan yang lebih baik, suatu bangsa harus dapat memperlakukan visi pembangunannya hanya berdasarkan perbandingan nilai indikator-indikator pembangunan masa kini dengan masa mendatang serta probabilitas nilainya di masa mendatang, melainkan harus juga dapat secara tepat menyusun peta tantangan-tantangan, merancang strategi-strategi, dan menyusun penilaian-penilaian hasil pembangunan berdasarkan suatu metode analisis kebijakan secara kuantitatif untuk dapat menyusun suatu peta jalan makro arah pembangunan nasionalnya. Peta jalan makro nasional inilah yang kemudian diturunkan menjadi peta jalan makro daerah yang bersifat sektoral, agar daerah juga dapat menyusun peta tantangan-tantangan, merancang strategi-strategi, dan menyusun penilaian-penilaian hasil pembangunan berdasarkan suatu metode analisis kebijakan secara sektoral. Visi-visi Astacita yang diwarnai dengan semangat memperkuat ketahanan negara, tidak hanya dari sisi kemampuan militer, namun juga dari sisi mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air dan perekonomian, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dari sisi kesehatan, pendidikan, kemampuan sains dan teknologi sebagai langkah awal dalam pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, menyiratkan dengan kuat bahwa visi ini memandang perekonomian sebagai bagian dari keamanan nasional dan perlunya kekuatan dan pengarusutamaan inovasi di dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2000-2024
(dari berbagai sumber)



Pemerintah daerah dapat melakukan suatu pemetaan struktur perekonomian, industri, sektor keuangan, jasa dan sebagainya sebagai langkah awal dalam pemetaan kekuatan-kekuatan pembangunan di berbagai sektor dalam upaya mendesain langkah-langkah inovasi dan pengembangan baru berdasarkan kondisi-kondisi sebelumnya. Dari sisi ini, setiap pemerintah daerah dapat menyusun suatu keterkaitan antara aktor-aktor dan lembaga-lembaga inovasi pada sebuah wilayah tertentu yang memungkinkan pembentukan, pembauran dan penentuan kecocokan inovasi di daerah tersebut. Sistem inovasi sektoral di level daerah pada akhirnya akan dikonsepsikan sebagai suatu jaringan berbagai agen yang saling berinteraksi pada sebuah wilayah ekonomi atau industri di bawah sebuah lembaga tertentu yang terlibat dalam pembentukan, difusi dan pemanfaatan inovasi bagi percepatan pembangunan daerah. *Policy Brief* ini mencoba menganalisis dan memberikan Ringkasan dan Saran Kebijakan bagaimana Pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat memanfaatkan gagasan inovasi atas struktur organisasi dalam mencapai tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan 8 Visi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045 di lingkup Kabupaten Purwakarta.

TINJAUAN REFERENSI : Pemahaman Tentang Inovasi

Pemahaman tentang inovasi biasanya mengacu pada sesuatu hal yang baru, yaitu sesuatu yang belum ada sebelumnya, dan persepsi sebagian besar masyarakat inovasi sebagai suatu proses penciptaan teknologi baru, namun demikian penciptaan produk atau teknologi baru sebenarnya hanya merupakan satu bagian atau salah satu cara dalam berinovasi. Penciptaan produk atau teknologi baru dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi bila produk atau teknologi baru tersebut memiliki nilai komersial di masyarakat/pasar. Bila produk atau teknologi baru tersebut tidak memiliki nilai komersial di masyarakat/pasar, maka produk atau teknologi baru tersebut tidak dapat digolongkan sebagai inovasi melainkan sebuah invensi (Diharto, 2022), dimana menurut Suyatno (2012), selain *discovery*, invensi juga merupakan bagian dari inovasi dalam mencapai tujuan atau pemecahan masalah tertentu. Artinya, penciptaan produk atau teknologi baru harus dilanjutkan dengan proses komersialisasi agar dapat menciptakan dampak ekonomi. Secara luas, inovasi dianggap sebagai faktor kunci di balik pertumbuhan ekonomi dan daya saing sebuah perusahaan, sebuah wilayah atau daerah, maupun sebuah negara. Pada masa sekarang, hasil-hasil penelitian tentang sistem inovasi cenderung berorientasi pada level makro (sistem inovasi nasional), level meso (sistem inovasi regional) dan sistem inovasi level sektoral, juga ada yang terkait dengan sistem inovasi organisasi dan sistem inovasi teknologi.

Sebuah sistem inovasi nasional terbentuk dari berbagai interaksi antar agen di dalam sebuah negara yang diikat oleh lembaga-lembaga negara tertentu serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kapabilitas nasional untuk membangkitkan, menghasilkan dan mengkombinasikan berbagai inovasi. Pada level yang lebih rendah, sistem inovasi regional dapat didefinisikan sebagai sebuah keterkaitan antara aktor-aktor dan lembaga-lembaga inovasi pada sebuah wilayah tertentu yang memungkinkan pembentukan, pembauran dan penentuan kecocokan inovasi di wilayah tersebut. Pada level di bawah regional, sistem inovasi sektoral dapat dikonsepsikan sebagai jaringan berbagai agen yang saling berinteraksi pada sebuah wilayah ekonomi atau industri di bawah sebuah lembaga tertentu yang terlibat dalam pembentukan, difusi dan pemanfaatan inovasi (Diharto, 2022). Inovasi dapat dikatakan sebagai produk dari adaptasi masyarakat terhadap perubahan atau kondisi yang tidak menyenangkan (tidak sesuai harapan) di saat-saat berada dalam situasi terancam atau terdesak. Jalur penghubung antara kondisi yang dihadapi dengan terjadinya inovasi adalah kreatifitas, yang menurut Rosenfeld (2002) dan Munandar (2012) merupakan kemampuan mengeksplorasi keberhasilan dari suatu gagasan baru, yang merupakan mobilisasi dari pengetahuan, keterampilan teknologi dan (atau) pengalaman untuk menciptakan produk (atau jasa), proses maupun kombinasi dari ketiganya (Junaidi, 2022).

ARTI PENTING INOVASI DALAM ASTACITA : Inovasi Organisasi dan *State Capacity*

Dalam Periode Presidensial sebelum terpilihnya Presiden Prabowo Subianto dengan 8 Visi Astacita-nya, yaitu di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 10(sepuluh) tahun, terdapat berbagai kemajuan di dalam tren pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur, pelayanan publik, pengurangan angka kemiskinan dan pengembangan kualitas SDM. Kunci dari seluruh keberhasilan ini adalah tata kelola yang baik (*good governance*) dan kapasitas negara (*state capacity*) atau dapat diartikan juga secara teknis sebagai kapasitas pemerintahan, apalagi Visi Astacita ini

memandang perekonomian sebagai bagian dari sistem keamanan nasional. *State Capacity* berarti kemampuan suatu institusi (*state*) untuk menjalankan pemerintahan (Nugroho, 2024) atau secara teknis dapat dikatakan juga sebagai kemampuan suatu institusi pemerintahan merencanakan dan menerapkan kebijakan-kebijakan pembangunan. Dalam sudut pandang inovasi menurut Schumpeter (1934) dalam Junaidi (2022), dapat dipandang bahwa peningkatan *state capacity* dalam menjalankan kinerja institusi pemerintahan merupakan proses inovasi organisasi, yaitu inovasi dalam hal praktik-praktik bisnis, cara menjalankan organisasi, perilaku organisasi yang baru atau bentuk organisasi yang baru. Artinya, secara kuat tersirat bahwa *state capacity* juga menuntut adanya kolaborasi, selain integrasi, antar institusi-institusi yang terlibat dalam menciptakan SDM (dan daya saing) yang unggul, sebagaimana diutarakan oleh Batoebara (2021).

PERAN INOVASI DAERAH UNTUK MERAH ASTACITA

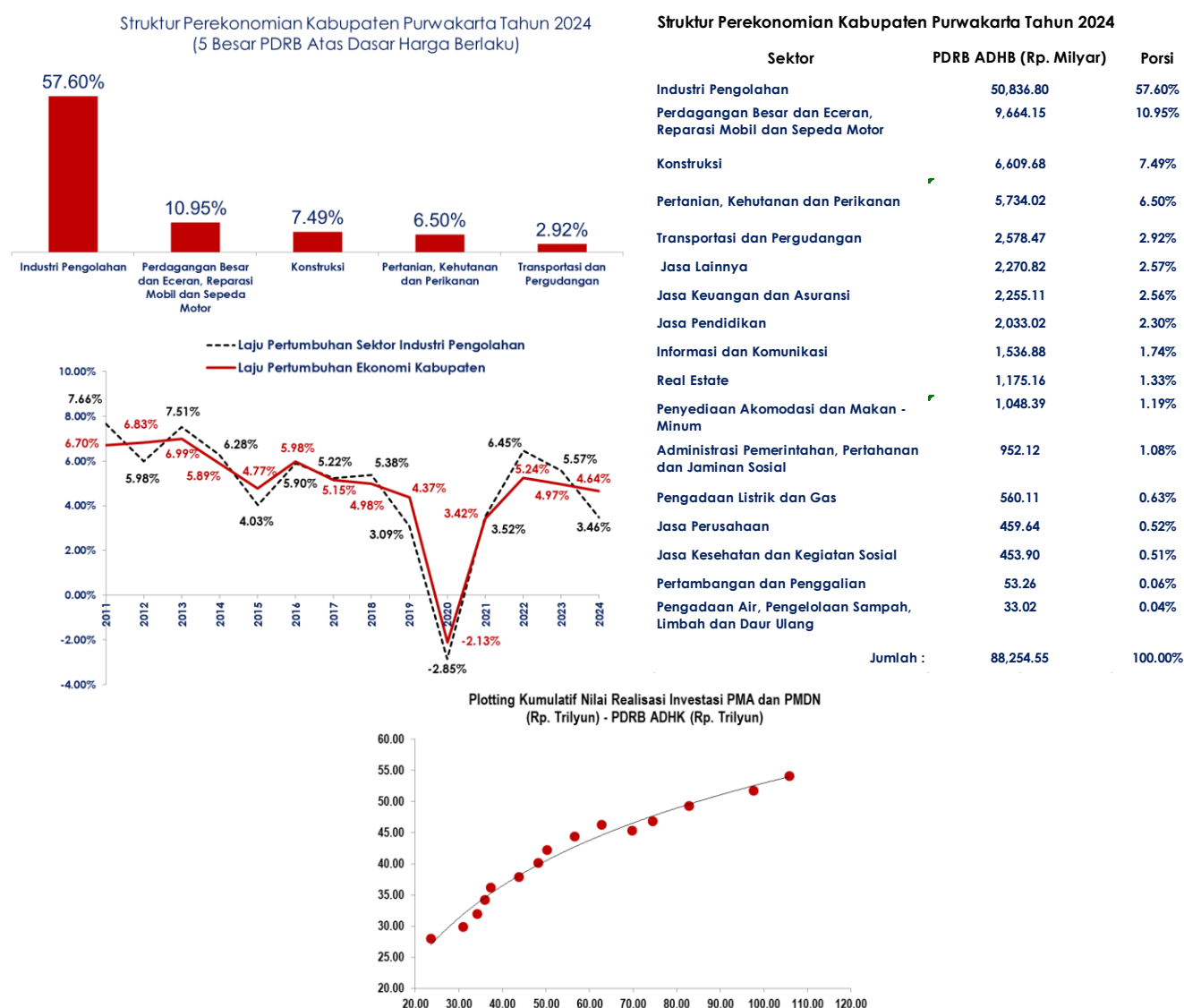
A. Integrasi Sistem dan Institusi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Dalam Meningkatkan *State Capacity*

Sebagaimana telah diuraikan di atas, *state capacity* memiliki tuntutan agar organisasi atau institusi pemerintahan yang mencoba meningkatkan kinerjanya, perlu untuk menjalankan proses inovasi organisasi, yaitu perilaku organisasi baru yang memiliki probabilitas besar dalam munculnya tuntutan akan bentuk organisasi yang baru. Menurut Nugroho (2024), salah satu tantangan besar dan utama dalam menjalankan dan meraih Visi Astacita adalah memperbaiki tata kelola atau *state capacity* agar pelayanan-pelayanan pemerintah sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya, salah satunya adalah dengan adanya integrasi antara perencanaan dan penganggaran, yaitu dengan adanya integrasi, yaitu dengan menyatukan antara institusi pengurus anggaran dengan institusi pengurus perencanaan pembangunan – tidak hanya dalam penerapan aplikasi online seperti Krisna dan Sakti, yang tidak cukup melakukan perannya dalam sinkronisasi antara penganggaran dan perencanaan pembangunan – namun juga integrasi secara kelembagaan/institusi. Semua negara maju telah mengintegrasikan institusi dan sistem perencanaan pembangunannya dengan institusi dan sistem penganggarnya, sesuatu hal yang harus kita tiru bila kita menginginkan negara Republik Indonesia juga menjadi negara maju (Nugroho, 2024). Dengan demikian, dalam semangat Visi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045, langkah maju yang patut diterapkan untuk meraih *state capacity* menurut Nugroho (2024) adalah inovasi integrasi sistem dan kelembagaan antara perencanaan dan penganggaran. Masih menurut Nugroho (2024), inovasi integrasi sistem dan kelembagaan antara perencanaan dan penganggaran ini masih memuat pertanyaan : Apakah saat penataan ulang, apalagi penggabungan 2 organisasi baru (perencanaan dan penganggaran), akan memerlukan waktu lama untuk beroperasi sepenuhnya? Bagaimana dengan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) dan aturan-aturan kerja? Tentu semuanya tidak bisa seketika langsung berfungsi “normal” sebagaimana yang diharapkan. Memang memerlukan waktu, dalam pandangan Penulis, paling tidak inovasi strategi keterpaduan 2 lembaga tersebut telah dijalankan, sambil diperbaiki pelan-pelan, namun sudah terjadi integrasi 2 fungsi dalam meraih keunggulan dalam penganggaran dan perencanaan pembangunan. Dari sudut pandang struktur perekonomian, dapat dikatakan bahwa *state capacity* seharusnya juga mencakup kontrol dan inovasi dalam pembangunan perekonomian daerah. Artinya, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, inovasi integrasi sistem dan lembaga perencanaan dan penganggaran juga mencakup *state capacity* dalam menganalisis struktur perekonomian sebagai bagian dari tugas perencanaan pembangunan.

B. Tinjauan *State Capacity* dan Struktur Perekonomian di Kabupaten Purwakarta

Terletak di sekitar pertengahan wilayah Provinsi Jawa Barat dan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta terletak pada titik pertengahan jalur transportasi darat Jalan Tol Cipularang (di sebelah Barat) yang menghubungkan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Purwakarta dan Kecamatan Padalarang (Kabupaten Bandung Barat) dan pada jalur transportasi darat Jalan Tol Cipali (di sebelah Utara) yang menghubungkan Kecamatan Cikampek (Kabupaten Karawang) dengan Kecamatan Palimanan (Kabupaten Cirebon). Mencakup 2.81% luas wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta memiliki luas wilayah 971,72 km², dengan $\pm 30\%$ luasannya merupakan wilayah perbukitan di sebelah Timur dan sekitar $\pm 36\%$ -nya merupakan wilayah dataran di sebelah Utara.

Dalam tinjauan struktur dan perkembangan perekonomian Kabupaten Purwakarta, data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta menunjukkan bahwa pada tahun 2024 (dan tahun-tahun sebelumnya selama lebih dari 10 tahun terakhir) struktur perekonomian Kabupaten Purwakarta 57%-58%-nya bertumpu pada Sektor Industri Pengolahan, yang berarti bahwa sistem perekonomian Kabupaten Purwakarta secara dominan dipengaruhi oleh sektor industri dan Sektor Industri Pengolahan secara langsung dipengaruhi oleh nilai realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Artinya, apabila dilaksanakan integrasi sistem dan lembaga perencanaan dan penganggaran daerah di Kabupaten Purwakarta, integrasi tersebut juga harus dapat meraih *state capacity* dalam meningkatkan kinerja investasi di wilayah Kabupaten Purwakarta. Hal ini berarti bahwa integrasi sebagaimana diuraikan di atas haruslah merupakan integrasi yang mengikuti arah, struktur dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Purwakarta, yang berarti merupakan integrasi dari sistem dan institusi perencanaan, penganggaran dan perijinan dan penanaman modal terpadu. Dengan demikian, setiap flow data pertumbuhan dan perkembangan investasi dapat dianalisis dan dijelaskan hubungannya secara lebih cepat dengan pertumbuhan perekonomian daerah, kemudian direncanakan target-target pertumbuhannya, lalu didesain penganggarnya.



KESIMPULAN

State capacity memiliki tuntutan agar organisasi atau institusi pemerintahan yang mencoba meningkatkan kinerjanya, perlu untuk menjalankan proses inovasi organisasi, yaitu perilaku organisasi baru. Dari sudut pandang struktur perekonomian daerah, dapat dikatakan bahwa *state capacity* seharusnya juga mencakup kontrol dan inovasi dalam pembangunan perekonomian daerah. Artinya, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, inovasi integrasi sistem dan lembaga perencanaan dan penganggaran juga mencakup *state capacity* dalam menganalisis struktur perekonomian sebagai bagian dari tugas perencanaan pembangunan. *State capacity* merupakan dasar pemikiran utama bagi unsur-unsur pemerintahan dalam meraih Visi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045, sebagai pijakan dan dasar inovasi operasional perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Dalam lingkup *national state capacity* (kemampuan nasional dalam menjalankan pemerintahan), inovasi berupa integrasi sistem dan institusi perencanaan dan penganggaran secara studi masih dipandang cukup dalam proses meraih Visi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045, namun dalam lingkup *under regional state capacity* (kemampuan daerah secara sektoral dalam menjalankan pemerintahan), inovasi berupa integrasi sistem dan institusi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dan perijinan dan penanaman modal terpadu (dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil analisis merupakan kombinasi integrasi yang krusial untuk pencapaian Visi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045, terutama dalam penekanan perekonomian sebagai bagian dari sistem keamanan wilayah dan struktur perekonomian berbasis industri yang bertumpu pada nilai investasi PMA dan PMDN. Integrasi ini diharapkan akan dapat menghasilkan produk-produk dan target-target perencanaan serta penganggaran pembangunan Kabupaten Purwakarta yang terpadu berbasiskan struktur perekonomian terkini dari hasil analisis terhadap setiap flow data pertumbuhan dan perkembangan investasi daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Anonim, 2011-2025, Buku Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2011-2025, Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta.
- Batoebara, M.U., 2021, Inovasi dan Kolaborasi Dalam Era Komunikasi Digital, Jurnal Prosiding Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa Medan Edisi 8 Januari – Juni 2021.
- Diharto, K.A, 2022, Manajemen Inovasi dan Kreativitas, Penerbit Gerbang Media Aksara – Bekerja Sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Surakarta.
- Junaidi, A.J., 2022, Solusi Adaptasi Kebiasaan Baru Dengan Kreatifitas dan Inovasi, Jurnal Manajemen dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022.
- Nugroho, Y., 2024, Tantangan Masa Depan Pemerintahan Prabowo, Opini Harian Kompas tanggal 23 Oktober 2024.
- Suyatno, 2010, Inovasi, Market Orientation, dan Advertising Internal Audience Serta Pengaruhnya Terhadap Pengambilan Keputusan, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang Volume 2 Nomor 1 Edisi Februari 2010.

SURAT PENUGASAN PENULISAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Gandanegara Nomor 25, Purwakarta, Jawa Barat 41111,
 Telepon (0264) 8307463, Faksimile (0264) 8307463,
 Laman: bappelitbangda.purwakarta.go.id, Pos-el : bappedakabpurwakarta@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor :800.1.11.1/005/Litb-Bappelitbangda/2025

Dasar : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama : Endra Prasetyo, ST., MT.
 NIP : 19750130 200604 1 006
 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/ IV.a
 Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
 Unit Kerja : Bappelitbangda Kab. Purwakarta

Untuk : Menyusun Policy Paper (Makalah Kebijakan)/ Policy Brief (Ringkasan Kebijakan) tentang aspek-aspek umum dan / strategis terkait pelaksanaan dan perkembangan pembangunan daerah di Kabupaten Purwakarta.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di : Purwakarta
 Pada Tanggal : 03 Januari 2025

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh:
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KABUPATEN PURWAKARTA

MHA:KOR/PA
 Pambina Utama Muda / IV.c